

# GAGASAN “RÉGULASI” DALAM UPAYA MEWUJUDKAN *EMBEDDED ECONOMY*

## A Prasetyantoko

**ABSTRAKSI.** Segala usaha di bidang ekonomi yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan kesetaraan dalam kehidupan umat manusia tampaknya berakhir dengan dehumanisasi. Alih-alih mencapai tujuan ekonomi yakni pengelolaan sumber-sumber daya alam demi mencapai kehidupan manusia yang lebih baik, sistem ekonomi malah gagal mencapai tujuannya. Krisis demi krisis menghantam dan menghancurkan sistem ekonomi. Belajar dari kegagalan yang terjadi sepanjang sejarah ekonomi, beberapa ilmuwan mencoba untuk membangun kembali sistem ekonomi yang menempatkan ekonomi sebagai bagian dari kehidupan manusia. Teori Régulasi adalah upaya untuk mengembalikan ekonomi kembali kepada akarnya yakni kehidupan sosial.

**ABSTRACT.** *Any effort in economy to accomplish welfare and equality in human life seems to end in dehumanization. Instead of reaching the economic goal that is to cultivate all resources and bring a better life for all, economic system fails to do what it purposes. Crises after crises ruin the construction of economic system. Learning from the failures that were happening in the history of economy, few scientists tried to build a new economic system that puts economy as part of human life. The Regulation Theory is an effort to bring back economy to its root that is human social life.*

**KATA KUNCI:** Teori Régulasi, ketercerabutan, krisis ekonomi, kebijakan dan campur tangan pemerintah.

### 1. PENDAHULUAN

Melalui *opus magnum*, *Great Transformation* (1944) Karl Polanyi menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang tercerabut dari akar sosialnya merupakan titik awal dari kehancuran.<sup>1</sup> Sistem pasar yang bekerja secara “independen” (*self-regulation mechanism*), telah menimbulkan berbagai *moral hazard* yang pada akhirnya membawanya pada kehancuran. Krisis adalah sebuah konsekuensi logis dari “ketercerabutan” itu. Dan kini, hampir semua

negara di seluruh dunia tengah dihantui oleh serentetan krisis yang nampaknya belum akan selesai<sup>2</sup>.

Indonesia, meskipun pada krisis global 2007/2008 ini tidak terlalu terpengaruh, tetapi pernah merasakan dampak krisis yang dramatis pada fase sebelumnya (1997/1998). Krisis ekonomi/finansial yang menandai koreksi terhadap mekanisme pasar direspons dengan mengemukakan peran pemerintah dalam perekonomian.

Sewaktu terjadi krisis Asia (1997/1998) dukungan terhadap campur tangan pemerintah masih terasa ragu. Kini dukungan terhadap pola kebijakan intervensi jauh lebih kuat, ketika krisis menghantam jantung perekonomian dunia, yaitu AS, Jepang, Kanada dan beberapa negara maju. Belum juga krisis di AS pulih, kini kegalauan tengah menyelimuti negara-negara di kawasan Uni-Eropa setelah terjadi krisis surat utang pemerintah (obligasi) di Yunani yang berpotensi menyebar ke Portugal, Itali dan Spanyol<sup>3</sup>.

Fakta kontemporer tentang krisis menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana “seharusnya” tatanan ekonomi (sistem kapitalis) ini dibangun? Kesalahan apa yang membuat kekacauan demi kekacauan (baca: krisis) datang silih berganti. Didesak oleh kegelisahan ini, para *scholars* kembali membongkar berbagai referensi lama perihal pertanyaan-pertanyaan fundamental tersebut<sup>4</sup>.

Dalam rangka diskusi mengenai relevansi pemikiran Polanyi, makalah ini akan melakukan dua hal. *Pertama*, membuat pertautan antara pemikiran Polanyi dengan gagasan *régulasi*<sup>5</sup> yang berkembang di Paris (*école Parisien*) pada akhir 1970an<sup>6</sup>. Tujuannya adalah menemukan titik temu antara Teori Régulasi (TR) dengan keprihatinan pokok Polanyi. Secara sederhana, keduanya memberikan perhatian sangat besar pada persoalan *embedded*

*economy*. Kedua, bersama dengan teori regulasi tulisan ini ingin membuat koneksi antara *disembedded economy* dengan realitas krisis ekonomi yang muncul belakangan ini. Sekaligus melihat perkembangan terakhir, terutama di Amerika Serikat (AS) tentang gejala “menanam kembali” dinamika ekonomi dalam dinamika sosial-politik.

## 2. RELEVANSI TEORI RÉGULASI TERHADAP POLANYI

Sama halnya dengan Polanyi, Teori Régulasi memfokuskan diri pada dinamika kapitalisme yang ditandai dengan ketercerabutan dinamika ekonomi dari sistem sosial-politik. Bagi Teori Régulasi, sistem kapitalisme bukanlah semata-mata sistem pasar, justru sebaliknya, sistem pasar adalah sebagian saja dari sistem kapitalisme. Obsesi besar Teori Régulasi adalah mengembalikan ilmu ekonomi ke dalam ilmu sosial. Implikasinya, prinsip mengenai *ceteris paribus* tidak bisa berlaku. Artinya, dinamika ekonomi yang “mengandaikan hal-hal yang lain tetap”, tidak berlaku. Dinamika ekonomi “harus” mengandaikan atau mempedulikan dinamika sosial politik.

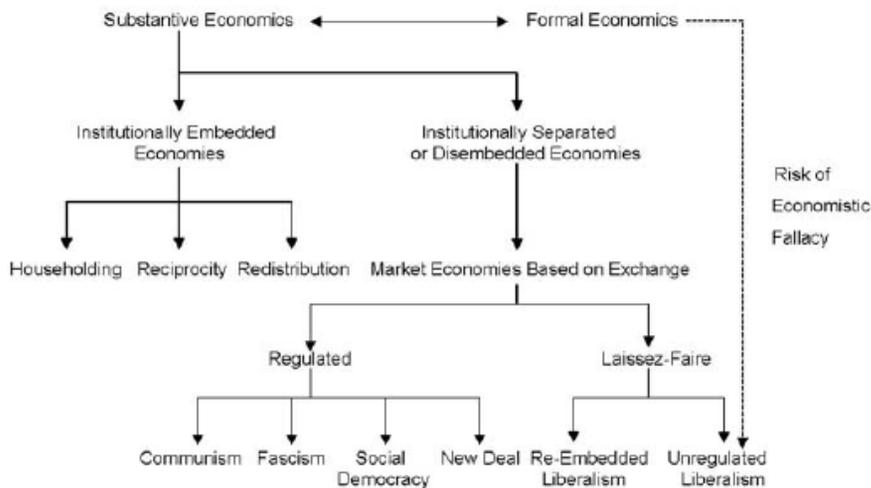
Dalam bahasa teknis, baik Teori Régulasi maupun Polanyi sama-sama memberikan perhatian pada tata kelola (*governance*) dan *meta-governance*. Tata kelola bukan sekedar seperangkat aturan main yang disusun, melainkan juga cara pandang atau cara berpikir yang melandasi bagaimana sistem dan dinamika ekonomi bekerja. Keduanya, berada dalam satu pemahaman, dinamika ekonomi “seharusnya” tidak terlepas dari dinamika sosial politik. Dan karena itu, *nature* berpikir keduanya (Teori Régulasi dan Polanyi) pada dasarnya bisa dikelompokkan ke dalam mashab institusionalis<sup>7</sup>.

Polanyi mengkritik “*economistic fallacy*” di mana prinsip dasar ekonomi adalah rasional dan kalkulatif sebagai dasar acuan tatanan sosial politik.

Menurut Polanyi, tidak semua transaksi dan pertukaran barang itu selalu dalam arti ‘*trade*’, bisa juga sebagai ‘*gift*’ yang bercorak komunalitas dan resiprokal.

Pada dasarnya, Polanyi mengidentifikasi tiga jenis interaksi antara kegiatan ekonomi dan non-ekonomi: a). *reciprocity*, b). *redistribution*, c). *householding*<sup>8</sup>. Tidak semua interaksi ekonomi bersifat “pertukaran yang anarkis” (*anarchy of exchange*). Bisa juga interaksi bersifat saling membalas, dalam rangka redistribusi dan kekeluargaan.

**Figure 1. The Hierarchy of Concepts in Polanyi**



Sumber : Jessop

Sama halnya dengan Polanyi, Teori Régulasi pada dasarnya memiliki argumen dasar bahwa rasionalitas ekonomi dan dinamika ekonomi tidak bisa dipandang sebagai semata-mata rasionalitas individu terhadap mekanisme harga, melainkan harus ditempatkan dalam konteks sosialnya. Pandangannya sangat jelas bahwa sistem ekonomi kapitalis bukanlah sebuah

dinamika yang terlepas dari dinamika sosial, sebaliknya justru sistem sosial harus mampu menjadi penopang dinamika ekonomi kapitalis. Dengan demikian, baik Polanyi maupun Teori Régulasi sama-sama memiliki pemahaman bahwa dinamika ekonomi merupakan “*socially regularized nature of capitalist economies*”, ketimbang semata-mata sebagai “*self-regulating market phenomena*”.

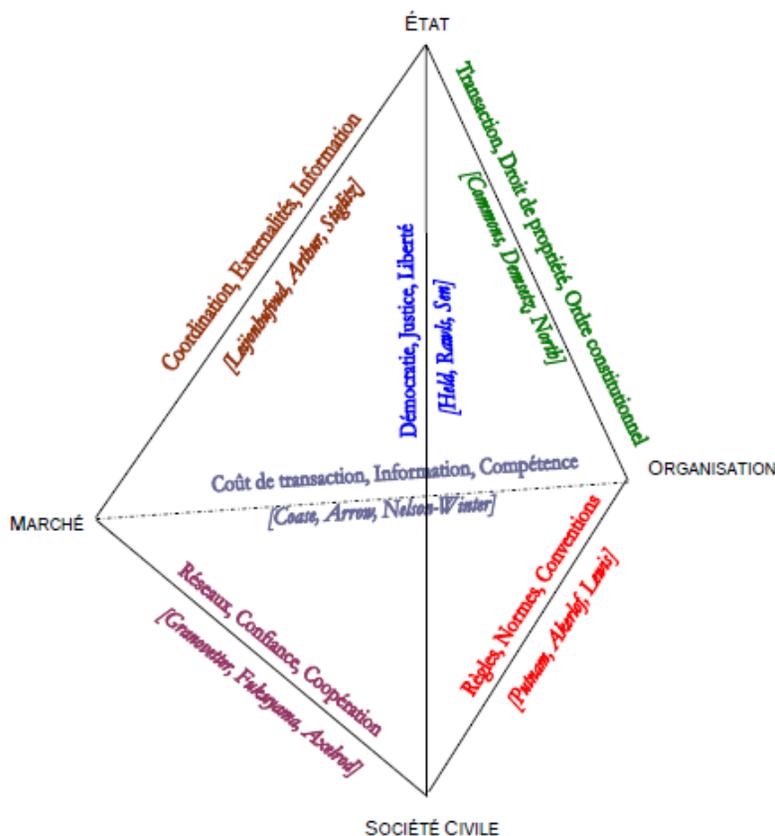
Teori Régulasi menganggap sistem pasar hanyalah sebagian dari dinamika kapitalisme. Selain dinamika pertukaran, ada pula faktor institusi, identitas kolektif, *shared visions*, aturan bersama, norma, konvensi (kesepakatan), *networks*, prosedur dan sebagainya. Semua faktor itu sama-sama ‘*me-regulate*’ dinamika kapitalisme yang ditandai oleh sistem akumulasi. Secara sederhana Teori Régulasi memfokus pada persoalan “keteraturan” (faktor-faktor yang membentuk) dari sistem akumulasi. Di balik proses akumulasi (*growth*) ada banyak dinamika yang “membangun”, sehingga perlu ditelaah bagaimana keteraturan itu berubah setiap saat, sehingga menentukan sistem akumulasi. Dengan kata lain, Teori Régulasi mengarahkan perhatiannya pada “*mode of regulation*”<sup>9</sup>.

Atas basis pemahaman yang sama ini, ada beberapa pemahaman atas konsekuensi dan implikasi kebijakan yang sebanding antara Polanyi dan Teori Régulasi. Polanyi misalnya memahami intervensi pemerintah sebagai bagian integral dari sistem ekonomi, karena pada dasarnya sistem ekonomi yang bersifat *self-regulating market* mengandung kontradiksi yang tidak bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri<sup>10</sup>. Pada dasarnya, pertanyaan yang diajukan oleh Teori Régulasi berbunyi : mengapa individu yang bebas tidak berakhir dengan kekacauan? Karena ada otoritas yang mengatur dan menata. Maka dari itu, Teori Régulasi memahami setidaknya ada lima kekuatan sebagai faktor penentu dinamika kapitalisme (*mode of regulation*), yaitu:

1. Bentuk rezim (sistem) moneter : uang bukan semata alat tukar tetapi sebuah tatanan yang mengatur dinamika yang kompleks dalam ekonomi (suku bunga, inflasi dan sebagainya)
2. Bentuk hubungan ketenagakerjaan : bukan semata-mata hubungan antara pekerja dan buruh yang sederhana, melainkan melibatkan berbagai model pengelolaan. Di AS ada ESOP (*employee stock option plan*), di Jerman ada istilah *Co-determination* (menukar kepemilikan saham dengan keterwakilan dalam dewan pengawas perusahaan oleh karyawan)
3. Bentuk persaingan : di Indonesia diatur oleh KPPU
4. Bentuk keterkaitan dengan rezim internasional : ekonomi terbuka atau restriktif (*capital control, dumping*)
5. Bentuk keterlibatan Negara dalam ekonomi

Secara keseluruhan dan bersama-sama, kelima *mode of regulation* ini akan saling terkait satu sama lain menghasilkan sebuah proses dan dinamika kapitalisme yang khas di masing-masing konteks negara. Dengan demikian, sistem kapitalisme bukan sesuatu yang bersifat universal ; dia akan sangat ditentukan oleh dinamika dari masing-masing konteks<sup>11</sup>.

Teori Régulasi memberikan konteks yang lebih luas dari dinamika ekonomi dan sistem ekonomi kapitalis. Sebenarnya, secara bagian per bagian, kritik terhadap ekonomi *mainstream* yang terlalu mengandalkan pada kekuatan pasar sudah dilakukan. Namun, kelebihan Teori Régulasi adalah mampu merangkum serta memberikan penjelasan dalam konteks yang lebih menyeluruh. Di bawah ini adalah bagan yang menunjukkan bagaimana Teori Régulasi berinteraksi dengan teori-teori yang berkembang luas di berbagai bidang ekonomi.



Sumber: Boyer 2004

Secara konseptual, Teori Régulasi<sup>12</sup> bertumpu pada kritik terhadap mekanisme pasar, sekaligus Marxis radikal. Dengan demikian, dia melakukan “double critic” sekaligus. *Pertama*, berangkat dari tesis Marxis tentang “instabilitas endogen” Teori Régulasi menyanggah teori keseimbangan umum (*general equilibrium*). *Kedua*, Teori Régulasi sendiri melakukan kritik terhadap pendekatan ekonomi politik Marxis, dengan mengatakan bahwa dilema kapitalisme tidak selalu berakhir dengan kehancuran yang membawa pada tatanan komunal, sebagaimana dikonsepsikan oleh Marx. Maka dari itu, Teori Régulasi sering disebut

sebagai teori yang “berangkat dari Marx, tanpa pernah kembali pada Marx” (*Un aller sans retour*).

Berangkat dari posisi dasar tersebut, Teori Régulasi ingin mengkritik tendensi ilmu ekonomi dewasa ini. Menurut teori ini, ilmu ekonomi cenderung mereduksi dirinya menjadi disiplin yang hanya mempelajari sistem ekonomi pasar, tanpa mau terlibat untuk mendalami relasi sosial yang ada di balik relasi ekonomi dalam sistem pasar tersebut. Cara pandang seperti ini memahami aktivitas dan masalah ekonomi dalam kerangka model keseimbangan umum belaka. Paradigma ini diusulkan oleh Léon Walras<sup>13</sup>, seorang ekonom dan ahli matematika dari Prancis yang dianggap sebagai pendiri teori keseimbangan umum. Ambisi Teori Régulasi adalah mengembalikan ilmu ekonomi ke akar ilmu sosial. Hal tersebut bisa dilihat dari komposisi para penggagasnya, yang terdiri bukan saja para ekonom, tetapi juga ahli politik dan sosiolog. Dalam artikel di edisi perdana jurnal resmi dari Teori Régulasi<sup>14</sup>, yaitu *Revue de la Régulation*, N°1, 2007, Robert Boyer menjelaskan bahwa perkembangan sistem kapitalisme kontemporer itu sendiri yang mendorong munculnya banyak kajian studi dengan perspektif yang bersifat multidisiplin, seperti sosiologi ekonomi dan ekonomi politik. Dalam kerangka pendekatan multidisiplin inilah Teori Régulasi memiliki relevansi keberadaannya.

Dalam paper tersebut Boyer ingin memberi kerangka pendekatan sosial bagi studi ekonomi. Mula-mula mengajukan pertanyaan klasik yang mungkin relevan: “Tentang sistem kapitalisme, bukankah Marx sudah memprediksi bahwa akan terjadi kehancuran akibat kontradiksi pada dirinya. Namun, di hari ini, bahkan para pemikir yang mengikuti pemikiran Marx pun mengakui bahwa sistem kapitalisme tetap hidup dan bertahan meski sudah melalui berbagai krisis hebat”.

Sementara itu, para ekonom cenderung menghindari kata “kapitalisme” karena dianggap berbau ideologis, serta lebih mengandungi analisis politik ketimbang ekonomi. Penggunaan istilah ekonomi pasar oleh sebagian besar ekonom secara implisit ingin mengatakan bahwa sistem pasar adalah dominan dalam dinamika ekonomi atau bahkan dianggap satu-satunya cara dalam mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Sementara negara, masyarakat (*civil society*) dianggap tidak perlu diperhitungkan dan sedapat mungkin disingkirkan dari analisis ekonomi.

Namun anggapan penganut aliran ekonomi (neo)-klasik ini segera akan berhadapan dengan realitas berbagai ketimpangan dan ketidaksempurnaan dan pada akhirnya menabrak prinsip pasar murni (*pure market*). Dalam praktek, berbagai ketidaksempurnaan dan ketimpangan telah menyebabkan pasar tidak mampu bekerja dengan baik sebagaimana mestinya. Sehingga, secara teoritis analisis yang hanya bertumpu pada pasar sebagai satu-satunya cara melakukan koordinasi tidak bisa dipertahankan lagi.

Terutama di pasar finansial kondisi tidak bekerjanya sistem pasar terjadi secara sempurna. Prinsip tentang informasi yang tidak seimbang (*asymmetric information*) di pasar finansial sudah diterima umum. Dalam konteks pemberian kredit misalnya, sudah umum diterima bahwa ada persoalan keagenan (*agency problem*) antara pemberi kredit dan penerima. Dengan demikian, hipotesis tentang efisiensi pasar (*efficient market hypothesis*) sudah runtuh dan tidak mendapatkan legitimasi baik di tingkat praktek maupun teori. Di AS, ilmu keuangan dengan peminatan di bidang perilaku keuangan (*Behavioural Finance*) berkembang pesat akhir-akhir ini.

### 3. RELEVANSI TERHADAP KRISIS

Robert Boyer menjelaskan bahwa perekonomian modern ditandai oleh tiga hal, yaitu: liberalisasi finansial di tingkat global, deregulasi di tingkat nasional dan inovasi produk finansial di tingkat institusi perusahaan. Ketiga faktor inilah yang mendorong terjadinya sistem finansial yang diwarnai dengan instabilitas yang tinggi. Berkaitan dengan krisis finansial, Boyer et al. (2004)<sup>15</sup> mengajukan tujuh proposisi tentang krisis finansial.

*Pertama*, memberikan fondasi pemahaman tentang bekerjanya sistem finansial modern di mana faktor ketidaksimetrisan informasi (*asymmetric information*) menjadi faktor yang sangat penting mempengaruhi bekerjanya sistem finansial. Karena informasi tidak seimbang di antara para pelaku ekonomi, terutama di sektor finansial, maka alokasi sumber daya (keuntungan) menjadi tidak efektif. Atau, selalu terjadi distorsi yang berujung pada ketimpangan; ada yang memperoleh keuntungan banyak, ada yang merugi. Akibatnya, pasar finansial selalu ditandai dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, tidak seimbangya informasi akan meningkatkan ketidakpastian dan kemudian tingkat spekulasi. Sehingga, bisa dipahami mengapa pasar finansial selalu diliputi oleh suasana spekulasi.

*Kedua*, pasar finansial modern ditandai dengan maraknya perilaku yang bersifat pro-siklik. Artinya, perilaku para aktor-aktor ekonomi cenderung mendorong gerakan siklus: ketika siklus sedang naik perilaku agen ekonomi mendorong siklus tersebut, sebaliknya ketika siklus sedang turun, mereka berbondong-bondong (*herd behavior*) mendorong siklus turun menjadi semakin cepat. Perilaku utang sering disebut sebagai perilaku yang bersifat pro-siklik. Penjelasananya, ketika situasi normal dan sedang tumbuh, utang mendorong pertumbuhan semakin cepat. Namun, ketika terjadi gejala resesi, perilaku utang bisa mendorong resesi ke arah krisis yang dalam.

*Ketiga*, hampir sama dengan sifat pro-siklik, sektor finansial memiliki sifat sebagai akselerator siklus ekonomi. Istilah populernya adalah *financial accelerator* yang berarti bahwa sektor finansial berfungsi mendorong siklus naik menjadi *booming* ekonomi, serta menjerumuskan siklus turun menjadi resesi dan krisis ekonomi. Sifat alamiah sektor finansial sebagai pendorong inilah yang mampu menjelaskan dengan baik pertanyaan mengapa di saat sektor finansial berkembang begitu cepat serta mendominasi sektor-sektor ekonomi lainnya, ekonomi menjadi begitu terombang-ambing dalam siklus yang ekstrem: *booming* menjadi resesi, dan *bearish* menjadi *bullish*.

*Keempat*, sektor perbankan memainkan peran sangat penting dalam dinamika ekonomi modern, dan terutama terhadap dinamika krisis. Sektor perbankan adalah sektor yang menjadi perantara (*intermediasi*) antara pemilik modal (penabung) dan pengguna modal (pengguna kredit). Sehingga, perilaku perbankan dalam menyalurkan kredit akan sangat menentukan stabilitas perekonomian. Katakan saja ketika perbankan mengabaikan sifat kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menyalurkan kredit pada saat itu akan terjadi injeksi modal yang berlebihan pada perekonomian secara tidak perlu. Sehingga, perekonomian menjadi riskan terhadap spekulasi yang berakhir dengan resesi.

*Kelima*, instabilitas finansial dan perekonomian bisa juga disebabkan oleh ketidaksesuaian (*incoherence*) pengelolaan ekonomi makro. Misalnya saja, penetapan suku bunga yang terlalu tinggi, akibat gejolak inflasi, sehingga sektor riil tidak bergerak. Atau sebaliknya, suku bunga yang terlalu rendah akan membuat likuiditas mengalir deras pada perekonomian.

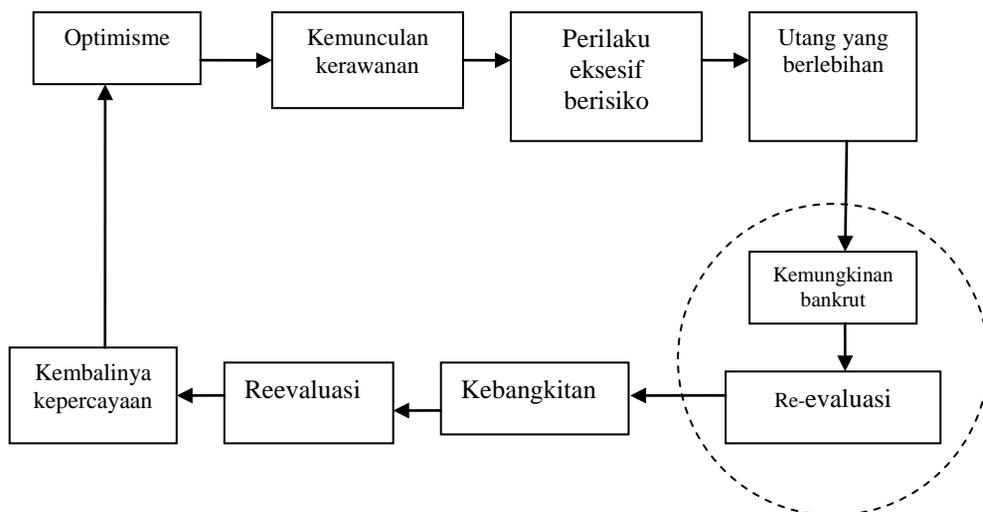
*Keenam*, ketidaksesuaian sistem finansial domestik dengan sistem finansial global. Misalnya, sistem finansial domestik yang masih belum tertata dengan baik, sehingga sistem tata kelolanya masih sangat buruk tetapi

liberalisasi sektor finansial dipaksakan secara eksekutif. Akibatnya, ada ketidaksesuaian sistem domestik dan global yang juga bisa menimbulkan gejolak, resesi dan krisis ekonomi.

*Ketujuh*, inovasi produk-produk derivatif dari perusahaan investasi merupakan faktor penting yang bisa mendorong perekonomian berada pada posisi yang riskan pada instabilitas. Sekarang ini, banyak sekali produk-produk derivatif yang diciptakan untuk menarik masukan para pemodal agar menanamkan uangnya ke pasar modal. Dengan demikian, produk-produk derivatif yang terus-menerus dilakukan inovasi merupakan penarik minat (*appetite*) para pemodal. Akibatnya, gelembung pasar modal makin besar dengan maraknya inovasi produk-produk derivatif tadi.

Secara sederhana, Teori Régulasi memahami krisis dan instabilitas ekonomi bersumber pada kekuatan dari dalam perekonomian. Dengan kata lain, instabilitas bersifat endogen. Sehingga, siklus *booming*-resesi, *bearish-bulish* adalah bagian yang tak terpisahkan dari dinamika ekonomi. Bagan di bawah ini menggambar siklus yang digerakkan oleh perilaku eksekutif aktor-aktor ekonomi. Ketika aktor ekonomi begitu optimis, maka mereka cenderung tidak hati-hati (spekulatif), akibatnya akan muncul kerawanan. Dan apabila ada risiko kerawanan, maka perilaku eksekutif akan makin meningkat (*pro-cyclical risk taking behavior*). Ketika siklus mengarah pada resesi, maka akan ada titik kebangkitan kembali yang memunculkan optimisme baru lagi. Dan siklus dimulai lagi.

## Bagan Siklus Kerawanan Finansial



*Catatan: garis titik-titik (lingkaran) menunjukkan wilayah penting dalam kerawanan finansial  
Sumber: Boyer et al. (2004)*

#### 4. PENUTUP

Dinamika kapitalisme yang akhir-akhir ini berkembang, di mana krisis merebak secara sekuensial menunjukkan dengan pasti, bahwa format (*mode*) kapitalisme yang berkembang belakangan ini banyak mengandung kelemahan yang berakar dari kontradiksi di dalamnya. Polanyi menunjukkan dengan jelas bahwa kontradiksi tersebut bersumber dari ketidaksepadanan mekanisme rasional pertukaran ekonomi dengan mekanisme sosial.

Tercerabutnya dinamika ekonomi dari tatanan sosial dianggap sebagai pemicu utama berbagai krisis yang nyata di hari-hari ini. Analisis dan argumentasi dasar ini juga dipakai oleh Teori Régulasi dalam memandang dinamika perekonomian, khususnya paska Fordisme AS. Secara lebih teknis, Teori Régulasi menunjukkan ketidakstabilan ekonomi yang akhir-akhir ini

muncul disebabkan telah tercerabutnya “ekonomi finansial” dari “ekonomi riil”. Ekonomi tidak lagi menjadi kegiatan memproduksi barang dan jasa yang memperkuat dinamika produksi – konsumsi, melainkan dinamika “investasi finansial” yang mengedepankan faktor spekulasi. Itulah ketercerabutan yang mutakhir, di mana sistem kapitalisme sudah mengarah pada tatanan yang ditarik oleh sistem keuangan (*finance-led capitalism*).

Keduanya, baik Polanyi maupun Teori Régulasi menunjukkan agenda politik (kebijakan) yang penting, yaitu bagaimana “menanam kembali” dinamika ekonomi ke dalam tatanan sosial, sehingga *mode of regulation* dari kapitalisme bisa lebih stabil serta memberikan janji kemakmuran bagi lebih banyak orang. Perekonomian yang tidak stabil dan selalu digoncang oleh krisis berpotensi menimbulkan berbagai persoalan yang pada dasarnya mencederai janji untuk memberikan tingkat kemakmuran pada masyarakatnya.

## CATATAN AKHIR

---

<sup>1</sup> Lihat Elmar Altvater, Birgit Mahnkopf dan Alan Scott, *The World Market Unbound, Review of International Political Economy*, Vol. 4, No.3, *The Direction of Contemporary Capitalism* (Autumn, 1997), pp. 448-471

<sup>2</sup> Nouriel Roubini (2010) bahkan menyebut bahwa krisis akan menjadi norma baru bagi perekonomian di masa depan. Lihat, Roubini, *Crisis Economics*.

<sup>3</sup> Sering disingkat PIIGS (Portugal, Ireland, Italia, Greece, Spain)

<sup>4</sup> Majalah *The Economist*, secara khusus sejak krisis membuka rubrik baru berjudul Schumpeter. Selain itu, pemikiran-pemikiran lama seperti Keynes, Minsky dijadikan referensi penting dalam ulasan-ulasan membahas fakta kekinian.

<sup>5</sup> Regulation bukan diterjemahkan dari bahasa Inggris yang berarti aturan main. Melainkan dari bahasa Prancis yang dalam bahasa Inggrisnya berarti “regularities”. Jadi pemikiran ini ingin melihat “keteraturan” sebuah sistem yang berevolusi dari waktu ke waktu dalam konjungtur jangka panjang.

<sup>6</sup> Teori Régulasi (TR) lahir pada 1978, ditandai dengan publikasi Michel Aglietta berjudul *Regulation et crises du capitalisme* (1976), disertasi (1974) mengenai hancurnya sistem Fordism di AS.

<sup>7</sup> Interpretasi Bob Jessop, seorang antropolog ekonomi dari Lancaster University. Lihat misalnya, Jessop, *Regulationist and Autopoieticist Reflections on Polanyi’s Account of Market Economies and the Market Society*, paper published at <http://comp.lancs.ac.uk/sociology/soc130rj.pdf>

<sup>8</sup> Jessop (2001), *Op.cit.*

<sup>9</sup> Secara teknis bisa dikatakan, ada banyak faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi (*growth*), mulai dari faktor budaya, dinamika sosial, serta sistem politik. Cara pandang yang mengatakan, pertumbuhan ekonomi hanyalah unsur modal, tenaga kerja saja, serta mengandaikan faktor-faktor lainnya tetap (*ceteris paribus*) pada dasarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

<sup>10</sup> Sumber instabilitas ada pada diri sistem itu sendiri, atau dengan bahasa lain, sumber kehancuran bersifat endogen, sehingga perlu intervensi dari otoritas yang lebih kuat agar rasionalitas dan kebebasan individu ada yang menata.

<sup>11</sup> Pada 2004, Robert Boyer menulis buku berjudul *Une Theorie du Capitalisme Est-Elle Possible?* (Teori Kapitalisme apakah Mungkin?), Odile Jacob, Paris. Buku ini membahas secara lengkap, bagaimana keterkaitan sistem kapitalisme dengan berbagai *mode of regulation*, sehingga tidak ada teori kapitalisme yang berlaku umum (*generic*).

<sup>12</sup> TR tidak terlalu berkembang di luar Prancis. Pertama, karena sebagai sebuah mashab masih relative baru, sehingga belum menjadi sebuah teori yang solid (masih menjadi agenda riset yang tersebar). Kedua, karena referensi di luar bahasa Prancis masih minim.

<sup>13</sup> Cara berpikir Walras sangat dipengaruhi oleh rasionalistas René Descartes dan ahli fisika Newton. Secara filosofis, Walras sangat dipengaruhi oleh Plato.

<sup>14</sup> Dalam edisi perdana, yang terbit pertama kali di bulan Juni 2007 tersebut, Boyer menulis paper yang berjudul “Capitalism strikes back why and what consequences for social sciences?”

<sup>15</sup> Robert Boyer bersama dengan Mario Dehove dan Dominique Plihon (2004) menulis buku berjudul “Les Crises Financières”. Buku ini sebenarnya ditulis sebagai laporan kepada Perdana Menteri (PM) Jean-Pierre Raffarin, sebagai bagian dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawab *Conseil d’Analyse Economique*, atau sebuah lembaga *thin-thank* (penasehat) yang bertugas memberikan masukan kepada Perdana Menteri mengenai persoalan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aglietta, Miche and Laurent Berrebi, (2007), *Désordres dans le Capitalisme Mondial*, Paris: Odile Jacob Economie.
- Aglietta, Michel dan Antoine Reberieux, (2004), *Dérives du Capitalisme Financier*, Paris: Bibliotheaue Albin Michel Economie.

- 
- Altvater, Elmar, *et al.*, (1997), The world market unbound, *Review of International Political Economy*, vol. 4, no.3, hal. 448-471.
- Boyer, Rober, Mario Dehove, Dominique Plihon, (2004), *Les Crises Financières*, Paris: Conseil D'Analyse Economique.
- Boyer, Robert dan Yves Saillard (eds), (2002), *Théorie de la Régulation: l'Etat des Savoirs*, Paris: Editions La Découverte.
- Boyer, Robert, ( 2004), *Une Théorie du Capitalisme est-elle Possible?*, Paris: Odile Jacob.
- \_\_\_\_\_, (2004), *Théorie de la Régulation: Les Fondamentaux*, Reperes, Paris: La Decouverte.
- \_\_\_\_\_, (2004), *The Future of Economic Growth*, UK: Edward Elgar Publishing.
- \_\_\_\_\_, (2003), Les Institutions dans La Théorie de la Régulation, *Working Paper Series*, No.2003-08, Paris: CEPREMAP-ENS, CNRS, EHESS.
- Caille, Alain, (2007), *Avec Karl Polanyi: Contre la Societe du Tout-Marchand*, Paris: Editions La Decouverte.
- Dunford, Michael, (2001), Globalization and theories of regulation, *mimeograph*, School of European Studies, UK: University of Sussex.
- Jessop, Bob, ( 2001), Regulationist and autopoieticist reflections on Polanyi's account of market economies and the market society, *paper* at <http://comp.lancs.ac.uk/sociology/soc130rj.pdf>